



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
UNIT KERJA : DEWAN DIREKSI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BOB SARIL**
2. Jabatan : **DIREKTUR NIAGA DAN MANAJEMEN PELANGGAN**
3. NHK : **199548**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 6.850.250.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 149 m2/210 m2 di KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 116 m2/54 m2 di BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
3. Tanah Seluas 2280 m2 di OGAN KOMERING ILIR, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
4. Tanah Seluas 124 m2 di BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 155.375.000
5. Tanah Seluas 400 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 325.000.000
6. Tanah Seluas 209 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
7. Bangunan Seluas 42.5 m2 di KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.024.200.000
8. Bangunan Seluas 48.45 m2 di KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.130.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 7150 m2/56 m2 di PURWAKARTA, HASIL SENDIRI Rp. 1.314.875.000
10. Tanah Seluas 15040 m2 di PURWAKARTA, HASIL SENDIRI Rp. 1.240.800.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 390.000.000**



1. MOBIL, NISSAN SERENA MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI
Rp. 170.000.000
2. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
200.000.000
3. MOTOR, GESITS MOTOR LISTRIK Tahun 2019, HASIL SENDIRI
Rp. 20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	192.210.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.171.150.347
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	8.603.610.347
III. HUTANG	Rp.	239.188.964
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	8.364.421.383

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.